



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
**UNIT KERJA** : PIMPINAN TERTINGGI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI**
2. Jabatan : **MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
3. NHK : **680204**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **5.511.554.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 393.250.000
2. Tanah Seluas 1550 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 519.250.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 295 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 427.020.000
4. Tanah Seluas 3450 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.800.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 702.660.000
6. Tanah Seluas 113 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HIBAH TANPA AKTA Rp. 160.008.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 811 m2/24 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 1.155.816.000
8. Tanah Seluas 1650 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 552.750.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **808.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, SUZUKI KARIMUN Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000



3. MOTOR, UNITED T1800 A/T/ SEPEDA MOTOR Tahun 2022,  
HASIL SENDIRI Rp. 29.500.000

4. MOBIL, HYUNDAI IONIQ EV 4X2 AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI  
Rp. 718.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 445.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.667.516.795

F. HARTA LAINNYA Rp. 284.079

Sub Total Rp. 11.433.354.874

III. HUTANG Rp. 224.943.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 11.208.411.874

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.